

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Minggu Pertama bulan November di Kabupaten Kutai Barat terjadi kenaikan IPH sebesar 1,42% dimana komoditi yang memiliki andil terbesar antara lain : Beras 0,428%, Pisang 0,442% serta Cabe rawit sebesar 0,391 %. Dan masuk dalam 10 (sepuluh) wilayah yang mengalami kenaikan IPH tertinggi se Indonesia. Memasuki minggu ke 2 Bulan November masih termasuk dalam wilayah yang mengalami IPH tertinggi yaitu sebesar 2,73 % dengan komoditi Cabe rawit 0,956%, beras 0,493% dan pisang 0,443%. Pada minggu ketiga bulan November terjadi kenaikan yang signifikan pada IPH yaitu sebesar 3,45 % dengan komoditi yang memiliki andil antara lain : cabe rawit 1,284%, daging ayam ras 0,624% dan beras 0,514%.

Berdasarkan hasil pantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di lapangan, Kenaikan harga Cabe rawit yang cukup signifikan disebabkan Daerah penghasil cabe di luar Kubar mengalami gagal panen/panen rusak sehingga pasokan ke Kutai Barat jadi terhambat dan terlambat. Beberapa pedagang membeli cabe rawit dari petani lokal dengan harga yang cukup tinggi sehingga dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Untuk kenaikan harga beras premium/medium tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat karena sudah banyak bertedar beras SPHP yang dijual pada Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan setiap hari Kamis oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga beras medium dan premium selama bulan Oktober-Desember 2025

Kenaikan harga beras medium dan Premium terjadi pada beberapa bulan sampai November 2025. Walaupun telah secara masif dilaksanakan Gerakan Pangan Murah yaitu setiap hari kamis sejak Agustus sampai dengan bulan Desember 2025, namun harga beras tidak dapat serta merta turun. Banyak faktor penyebab seperti distribusi tidak lancar karena akses jalan, transportasi serta beberapa penyebab lain yang menyebabkan harga beras masih belum stabil.

2. Komoditas Pangan sebagai Faktor Dominan Penyebab Inflasi/kenaikan harga

Pada bulan November terjadi kenaikan harga Cabe rawit yang cukup signifikan dikarenakan disebabkan daerah penghasil cabe di luar Kubar mengalami gagal panen/panen rusak sehingga pasokan ke Kutai Barat jadi terhambat dan terlambat. Pada bulan Desember menjelang Natal dan tahun Baru, Harga bawang merah mengalami kenaikan dari harga Rp. 45.000/kg menjadi Rp. 50.000 - Rp. 60.000/kg, ayam potong dari harga Rp. 45.000/kg menjadi Rp. 50.000/kg. Dan beberapa komoditi lain juga mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran.

3. Ketergantungan Tinggi terhadap Pasokan dari Luar Daerah

Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat

bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplay atau dipasok dari daerah lain, terutama Samarinda, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

4. Distribusi barang mengalami kendala karena akses jalan

Sampai Triwulan IV Tahun 2025, Jalan Nasional dari Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat masih rusak parah. Titik terparah adalah sejak Perbatasan Kukar-Kubar di Kecamatan Bongan sampai Kampung Resak, beberapa titik rusak juga di Kecamatan Jempang, Muara Lawa, dan yang cukup parah juga di Kampung Kinong Kecamatan Damai. Beberapa upaya telah diupayakan Pemerintah, namun belum ada Perbaikan atau Pemeliharaan dari Pusat maupun Provinsi Kaltim. Kerusakan jalan yang parah tersebut sudah pasti menghambat kelancaran distribusi Bahan pokok dan bahan pangan dari luar daerah. Sehingga menyebabkan kenaikan harga dikarenakan biaya operasional yang meningkat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pasar Murah Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru dilaksanakan oleh Disdagkop & UKM di 15 lokasi/kampung di Kecamatan Linggang Bigung, Sekolaq Darat, Tering, Barong Tongkok serta Melak pada tanggal 18 November s/d 12 Desember 2025.

2. Kegiatan Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan setiap hari Kamis mulai bulan Agustus sampai dengan 18 Desember tahun 2025, dengan bekerja sama Bulog Samarinda serta beberapa pedagang lokal sebanyak 39 kali dengan penerima manfaat lebih dari 12.000 jiwa.

3. Kegiatan Pemantauan harga dan stok Bahan pokok serta bahan pangan menjelang Hari Natal dan Tahun Barudilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat dan Bagian Perekonomian Kabupaten Kutai Barat

4. Kegiatan Zoom High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan setiap hari senin/selasa.

5. High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025 dengan dipimpin oleh Bupati Kutai Barat dan dihadiri oleh Forkopimda, serta OPD anggota TPID serta BPS dan Perbankan, dengan didampingi Ekonom Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sebagai Narasumber. Dalam HLM TPID disampaikan bahwa sementara hasil dari Pemantauan Lapangan bahwa stok/ketersediaan bahan pokok serta bahan pangan cenderung aman. Serta harga masih cukup stabil.

6. Sebagai tindak lanjut dari HLM TPID, pada tanggal 12 Desember 2025 dilaksanakan Sidak Pasar dan Operasi Pasar serta SPBU yang dipimpin oleh Bupati Kutai Barat. Sidak Pasar dan SPBU ini dilaksanakan dalam rangka menjelang Hari Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi, perhatian kepada masyarakat serta pedagang lokal. Bupati Kutai Barat didampingi Forkopimda serta Para Kepala OPD Anggota TPID. Dalam

sidak pasar dijumpai kenaikan harga bahan pokok dan bahan pangan seperti bawang merah, ayam potong serta telur, namun masih dalam tahap wajar sedangkan yang lain masih cenderung stabil. Sidak SPBU dilaksanakan pada SPBU terbesar di Kecamatan Barong Tongkok dan dapat dilaporkan bahwa stok BBM aman dan diharapkan tercukupi sampai Tahun Baru.

7. Pengawasan LPG 3 kg dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dilaksanakan pada Bulan November 2025

8. Pengawasan distribusi solar bersubsidi dilaksanakan di 16 Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdapat APMS/SPBU dilaksanakan pada bulan November 2025

9. Surat Usulan Kuota JBT dan JBKP untuk tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2025 adalah sebesar 10.338 KL untuk JBT (Solar) dan 34.583 KL untuk JBKP (Pertalite)

10. Surat Usulan Kuota LPG 3 kg untuk tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2025 adalah sebesar 8.683 MTon

11. Pada awal tahun 2025, stok Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 88.439,5 Kg dan telah dilakukan 2 (dua) kali kontrak penambahan stop CPP sehingga total stok sebanyak 120.419,5 Kg. Selanjutnya besaran CPP yang telah disalurkan di 13 lokasi yang terdampak bencana seperti tanah longsor maupun kebakaran adalah sebanyak 6.840 Kg, sehingga stok CPP yang tersisa di Bulan Desember sebanyak 113.579,5 Kg.

12. Dinas Pertanian sudah membagikan beberapa bantuan ke masyarakat seperti : Pengadaan benih padi sawah dan padi ladang, pengadaan benih cabe, jagung manis, kacang panjang, terong serta pupuk kandang, pengadaan pupuk NPK, pupuk Urea, pengadaan ternak sapi, babi, kambing, itik dan ayam, serta bantuan alsintan dan herbisida. Dinas Pertanian juga mulai mencoba mengembangkan komoditi bawang merah yang ditanam di areal seluas 2 hektar yang merupakan kerjasama UPT Pertanian Empas dan BUMP

13. Dinas Perikanan sudah melaksanakan beberapa kegiatan serta pengadaan bantuan ke masyarakat antara lain: Restocking bibit ikan sejumlah 711.000 ekor di 5 kecamatan serta Bantuan-bantuan ke masyarakat seperti : Pengadaan bibit ikan patin dan jelawat, pengadaan bibit ikan nila, ikan lele dan ikan mas, pakan ikan, pengadaan perahu fiber dan perahu kayu, mesin ketinting, jaring apung pukat, keramba jaring apung, kolam bundar, kolam terpal, keramba ulin serta bantuan indukan ikan hias.

14. Dalam rangka menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain : Rampcheck/Pemeriksaan Bersama (Polres/Polairud, Kodim 0912, Satpol PP, Jasa Raharja, UPT Pelabuhan, Tim penguji UPT PKB, Para Camat, BPBD, UPBU Melalan) terhadap unit/moda transportasi yang berkeselamatan baik sungai maupun darat, Pembangunan/penetapan pos-pos pantau angkutan nataru baik di sungai maupun di darat, Sosialisasi dan pemasangan baliho himbauan keselamatan berlalu lintas di pelabuhan dan pos pantau, Penunjukan dan penempatan personil pengawasan dan pengendalian di setiap pos pantau serta beberapa kegiatan menjelang serta Arus balik Nataru tahun 2025.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Keterjangkauan Harga** : Maksimalkan Operasi Pasar dan/atau Gerakan Pangan Murah untuk komoditas pangan strategis yang memiliki potensi peningkatan tekanan harga seperti beras, bawang dan minyak, Sidak Pasar dan Distributor khususnya komoditas pangan strategis seperti Agen Beras, Agen Bawang Merah dll, Mendorong penambahan frekuensi penerbangan atau penambahan rute Sendawar-Samarinda, Mendorong adanya subsidi harga Tiket Pesawat Tebang rute Melak-Balikpapan
 2. **Ketersediaan Pasokan** : Berdayakan BUMD sebagai penyangga pangan melalui perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi. Sementara ini masih diupayakan BUMD Kutai Barat untuk bisa disehatkan, Penyaluran bantuan alsintan dilaksanakan oleh OPD teknis, Menggalakkan program tanam di pekarangan masyarakat seperti Cabe, sayur, buah dll, Penyediaan/pemanfaatan *cold storage* untuk produk hortikultura
 3. **Kelancaran Distribusi** : Subsidi ongkos angkut untuk penyediaan bahan pokok seperti beras, telur, gula, minyak, bawang diupayakan terus oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat, Penguatan dan pemantauan kuota BBM di SPBU, khususnya solar untuk angkutan umum
 4. **Komunikasi yang Efektif** : Himbauan belanja bijak dan tidak *panic buying* kepada masyarakat, Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing OPD melalui *high level meeting* untuk menyusun strategi pengendalian inflasi daerah.
2. Penguatan kelembagaan TPID dengan melaksanakan *Capacity Building*/studi tiru ke Daerah Produsen/ champion
3. Memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, termasuk mendorong pembentukan kios penyeimbang di kabupaten Kutai Barat
4. Fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas dan pembangunan sarana pangan untuk komoditas pokok dan penyumbang inflasi tinggi.
5. Meningkatkan seruan konsumsi secara wajar dengan bijak berbelanja, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui publikasi informasi yang benar mengenai harga dan ketersediaan pangan.
6. Gerakan menanam di pekarangan berfokus pada pemanfaatan lahan terbatas untuk menanam berbagai tanaman seperti sayur dan cabe.
7. Pemberian bantuan bibit sayuran dan cabe serta pupuk dan polibag dalam rangka mendukung Gerakan menanam di pekarangan.
8. Pemberian bantuan bibit padi bagi petani di OPD teknis dalam mendukung ketahanan pangan.